



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2025**

**TENTANG
PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK PADA FASE SERIBU HARI
PERTAMA KEHIDUPAN**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (6), Pasal 37, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan mengamanatkan untuk menyusun Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian dalam menyusun Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan;

Mengingat ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6923);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANITIA
ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK PADA FASE
SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN.

KESATU : Membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau
Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini.

KEDUA : Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai
tugas untuk:

- a. memberikan masukan terkait dengan substansi yang
akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;
- b. melakukan penyiapan, pengolahan, dan perumusan
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024
tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu
Hari Pertama Kehidupan; dan
- c. melaporkan kepada dan/atau meminta arahan dari
menteri/pimpinan lembaga pemerintah non
kementerian/pimpinan lembaga terkait masing-masing
mengenai perkembangan penyusunan Rancangan
Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari
Pertama Kehidupan dan/atau permasalahan yang
dihadapi.

KETIGA ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Kesetaraan Gender Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK
PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA
KEHIDUPAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Pengarah: Arifatul Choiri Fauzi	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II.	Penanggung Jawab: Titi Eko Rahayu	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II.	Ketua: Amurwani Dwi Lestariningsih	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
III.	Wakil Ketua: Siti Mardiah	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
IV.	Sekretaris: Agung Budi Santoso	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
V.	Anggota:	
	1. Desy Andriani	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2. Pribudiarta Nur Sitepu	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
	3. Ratna Susianawati	Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	4. A. Majdah Muhyiddin Zain	Staf Khusus Menteri Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	5. Ariza Agustina	Staf Khusus Menteri Bidang Perlindungan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	6. Zahrotun Nihayah	Staf Khusus Menteri Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	7. Siti Nia Nurhasanah Sjarifudin	Staf Khusus Menteri Bidang Perempuan dan Politik, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	8. Muhaziron Sulistiyo Wibowo	Kepala Biro Data dan Informasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	9. Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	10. Eni Widiyanti	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah I, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	11. Iip Ilham Firman	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II,



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
		Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	12. Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	13. Nani Dwi Wahyuni	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	14. Fatahillah	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	15. Devy Nia Pradhika	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	16. Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	17. Endah Sri Rejeki	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	18. Margareth Robin Korwa	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
	19. Prijadi Santoso	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	20. Dian Ekawati	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	21. Sylvianti Angraini	Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	22. Muhammad Ihsan	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	23. Susanti	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	24. Dwi Jalu Atmanto	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	25. Syarip Hidayat	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	26. Mustikorini Indrijatiningrum	Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	27. Nia Reviani	Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan, Kementerian



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
		Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	28. Niken Ariati	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	29. Arif Rahman	Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
	30. Rahayu	Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
	31. Sorta Delima Lumban Tobing	Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kebijakan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan
	32. Erwana Firdaous	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Koordinator Bidang Pangan
	33. Sabbat Christian Jannes	Asisten Deputi Keamanan dan Mutu Pangan dan Gizi, Kementerian Koordinator Bidang Pangan
	34. Muhammad Waliyadin	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II, Kementerian Hukum
	35. Ari Prasetyo	Kepala Biro Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
	36. Raden Rara Rita Erawati	Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
	37. Indah Febrianti	Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
	38. Lovely Daisy	Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan
	39. Niken Wastu Palupi	Sekretaris Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan
	40. Reni Mursidayanti	Kepala Biro Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan
	41. Decky Haedar Ulum	Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja, Kementerian Ketenagakerjaan
	42. Rinaldi Umar	Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan
	43. Rizi Umi Utami	Kepala Biro Hukum, Kementerian Sosial
	44. Mas Kahono Agung Suhartoyo	Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial
	45. Idit Supriadi Priatna	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial
	46. Beni Sujanto	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial
	47. Neneng Heryani	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial
	48. Vivi Andriani	Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
	49. Rusprita Putri Utami	Kepala Pusat Penguatan Karakter, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
	50. Nia Nurhasanah	Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
	51. Imam Syaukani	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Agama
	52. R. Gani Muhamad	Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
	53. Paudah	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri
	54. Yudha Purnawan Sudijanto	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
	55. Irma Ardiana	Direktur Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
	56. Sri Rejeki Nawangsasih	Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	57. R. Roro Vera Yuwantari Susilastuti	Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	58. Diah Faras	Plt. Asisten Deputi Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	59. Lalu Syaifudin	Kepala Biro Hukum, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
	60. Radita Ajie	Kepala Biro Hukum, Kementerian Komunikasi dan Digital
	61. Mediodecci Lustrini	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital
	62. Nurul Azizah	Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang, Kepolisian Negara Republik Indonesia



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
	63. Rachmad Firdaus	Kepala Biro Organisasi, SDM, dan Hukum, Badan Pangan Nasional
	64. Rinna Syawal	Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Badan Pangan Nasional
	65. Yulanto Araya	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum
	66. Khoirul Huda Basyir Habibullah	Pranata Humas Ahli Madya, Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Agama
	67. Eppy Lugiarti	Analisis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
	68. Rena Satrinny	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Badan Pangan Nasional
	69. Maya Safrina	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya, Badan Pangan Nasional
	70. Muhammad Rafiq Abdillah Duyo	Analisis Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital
VI.	Sekretariat:	
	1. Prita Ismayani Sriwidyarti	Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2. Maya Septiyana	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	3. Davip Arya Bhima	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	4. Fikhi Akbar	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	5. Permata Sari	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	6. Tabita Mauliate Ulibasa	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	7. Esti Hartati	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda pada Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	8. Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	9. Robby Prawira N	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	10. Andi Lele Ellung Pangerang	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
	11. Rina Mofu	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	12. Sekar Santi Nastiti	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	13. Makna Sinatria	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	14. Mega Haditia	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	15. Bangun Laksono	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	16. Grace Melda Yovita	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	17. Achmad Fachrurrozie	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
	18. Ario Pratama S	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI